

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN YONIF 521/DY DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN WILAYAH PERTAHANAN DI KABUPATEN KEDIRI

Rendra Akbar¹
Rira Nuradhawati²
Zaenal Abidin AS³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : rendraakbar110@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keamanan regional, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Batalyon Infanteri Mekanis 521/Dadaha Yudha (Yonif 521/DY) telah menjadi fokus utama dalam strategi pertahanan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana sinergi antara kedua entitas ini dapat meningkatkan pengembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri. Penelitian berjudul "Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Yonif 521/DY dalam Meningkatkan Pengembangan Wilayah Pertahanan di Kabupaten Kediri" menggunakan teori sinergi dan teori kepemimpinan untuk menganalisis kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Yonif 521/DY dalam meningkatkan wilayah pertahanan. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil penelitian serta menggunakan analisis SWOT untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi. Penelitian ini menyoroti bagaimana sinergi antara Pemerintah Daerah dan Yonif 521/DY dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keamanan daerah, serta bagaimana teori kepemimpinan memainkan peran penting dalam memotivasi dan mengarahkan prajurit untuk mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan Yonif 521/DY telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan keamanan, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kediri. Dalam kesimpulan penelitian ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Yonif 521/DY dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan/program yang telah dilaksanakan secara bersama-sama untuk meningkatkan pembangunan daerah pertahanan di Kabupaten Kediri. Dan saran yang dapat disampaikan adalah untuk terus meningkatkan sinergi antara keduanya, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan meningkatkan sumber daya yang ada.

Kata kunci: Sinergi, Pemerintah Daerah, Yonif 521/DY

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Abstract

In an effort to increase efficiency and effectiveness in regional security, synergy between the Regional Government and the 521/Dadaha Yudha Mechanized Infantry Battalion (Yonif 521/DY) has become the main focus in the regional defense strategy. This research aims to analyze and understand how the synergy between these two entities can improve the development of defense areas in the District. Kediri. The research entitled "Synergy between Regional Government and Yonif 521/DY in Increasing Defense Area Development in Kediri Regency" uses synergy theory and leadership theory to analyze cooperation between Regional Government and Yonif 521/DY in improving defense areas. Qualitative methods are used to collect data and analyze research results and use SWOT analysis to assist in solving problems that occur. This research highlights how synergy between the Regional Government and Yonif 521/DY can increase efficiency and effectiveness in regional security, as well as how leadership theory plays an important role in motivating and directing soldiers to achieve common goals. The research results show that the synergy between the Regional Government and Yonif 521/DY has contributed significantly to improving security, infrastructure and quality of life for the people in Kediri Regency. In the conclusion of this research, the synergy between the Regional Government and Yonif 521/DY can be seen from the existence of several activities/programs that have been carried out jointly to improve the development of defense areas in the District. Kediri. And the suggestions that can be conveyed are to continue to increase the synergy between the two, increase human resource capabilities, and increase existing resources.

Keywords: *Synergy, Regional Government, Yonif 521/DY*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dari Sabang hingga Merauke dan memiliki lebih banyak luas lautan daripada daratan. Hal tersebut dibuktikan dengan data bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan luas 7,81 juta km² meliputi wilayah daratan 2,01 juta km² dan wilayah laut 5,8 juta km² yang dicantumkan pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 poin konstelasi geografis Indonesia (Keputusan Panglima TNI, 2018). Definisi daerah provinsi yang berciri kepulauan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Nomor 23 Tahun 2014 yang mana direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Keanekaragaman Suku, Agama, Ras, dan Budaya (SARA) memengaruhi dinamika sistem pertahanan negara. Multidimensi dan kompleksitas SARA di Indonesia sangat besar.

Apabila tidak dikelola dengan benar, perbedaan yang berbeda cenderung menyebabkan berbagai konflik nasional. Dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang bersifat komprehensif dan mampu menangkal segala bentuk ancaman, maka diperlukan peran dari berbagai pihak yang terlibat dalam rangka membangun postur pertahanan yang ideal. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002, pertahanan Republik Indonesia terdiri dari semua upaya pertahanan semesta yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warganegara serta keyakinan pada kekuatan sendiri dengan melibatkan segenap kekuatan negara.

Pertumbuhan wilayah pertahanan daerah merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman militer dari negara lain, baik dari udara, darat, maupun laut. Pola pertahanan daerah fokus pada pertahanan suatu wilayah atau daerah tertentu, berbeda dengan pertahanan nasional yang melibatkan seluruh wilayah suatu negara. Pola pertahanan daerah biasanya diterapkan di wilayah perbatasan atau daerah yang memiliki nilai strategis. Beberapa jenis pola pertahanan daerah termasuk pertahanan zonasi, daerah pangkal perlawanan, dan tata ruang wilayah pertahanan. Implementasi pola pertahanan daerah memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pertahanan dan masyarakat. Daerah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pangkal perlawanan, misalnya, merupakan bagian tertentu dari satu ruang / wilayah pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat operasi gerilya, serta tempat penyusunan kekuatan, konsolidasi, istirahat, dan penimbunan barang-barang logistic. Pola pertahanan daerah melibatkan penyusunan tata ruang wilayah pertahanan dengan sasaran terwujudnya wilayah pertahanan yang siap sebagai mandala perang atau mandala operasi untuk mendukung pertempuran. Selain itu, melibatkan juga inventarisasi data perlawanan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara. Pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan. Sementara pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus mendapat izin dari Menteri Pertahanan.

Selain peningkatan wilayah pertahanan nasional, peningkatan perkembangan wilayah pertahanan daerah merujuk pada upaya untuk memperkuat dan melindungi wilayah tertentu guna mendukung pertahanan negara. Hal ini meliputi penataan ruang wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendaliannya. Penataan wilayah pertahanan bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Upaya ini juga melibatkan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan penataan ruang wilayah pertahanan. Selain itu, konsep pengembangan wilayah juga mencakup upaya untuk mengatasi kesenjangan wilayah, meningkatkan keterpaduan antar sektor pembangunan, dan menyeimbangkan pembangunan nasional. Perencanaan ruang berbasis pertahanan dan keamanan juga menjadi penting dalam mendukung logistik wilayah dan operasi perlawanan. Sinergitas adalah kemampuan bekerja sama dengan baik dan mampu menjaga keseimbangan dalam prosesnya sehingga akan menghasilkan keluaran yang lebih baik dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Seperti yang telah di sebutkan pemerintah daerah memiliki peran penting

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dalam meningkatkan pertahanan wilayah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan wilayahnya, termasuk dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk mengimplementasikan kebijakan pertahanan yang efektif. Menurut teori sinergitas yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner dan Charles Wankel pada tahun 1986, tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Dalam penataan wilayah pertahanan di daerah Jawa Timur, beberapa faktor yang diperhatikan antara lain tipologi wilayah, persiapan menghadapi ancaman, alih fungsi lahan, dan kerja sama antara TNI dan masyarakat. Pihak TNI telah memetakan wilayah Jawa Timur sesuai dengan tipologi, termasuk persiapan yang harus dilakukan apabila terdapat ancaman. Selain itu, alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor masalah yang perlu diperhatikan. Pemanfaatan wilayah pertahanan harus dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan. Kerja sama antara TNI dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi pola pertahanan daerah. Beberapa penjelasan mengenai sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Yonif 521/DY dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri yang merupakan hal yang penting untuk keamanan dan pembangunan daerah. Kolaborasi antara pihak militer dan pemerintah daerah dapat mendukung berbagai aspek, termasuk pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur. Upaya sinergi ini dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti patroli bersama, pelatihan, dan koordinasi dalam penanggulangan masalah keamanan. Dengan demikian, sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan wilayah pertahanan dan kesejahteraan masyarakat di

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Kabupaten Kediri.

Sinergi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Yonif 521/DY terlihat penting dalam penanggulangan bencana alam, konflik sosial, dan pembinaan kondisi sosial. Koordinasi efektif dan terpadu antara Pemerintah Daerah, TNI AD, dan stakeholder lainnya diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri. Kemudian Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan penataan ruang wilayah pertahanan. Oleh karena itu diperlukan suatu sinergi antara Pemerintah dengan TNI.

Yonif 521/DY adalah salah satu batalyon infanteri yang berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya. Batalyon ini memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan tugas pertahanan, termasuk dalam operasi- operasi di berbagai daerah rawan konflik seperti Papua, Aceh, dan Timor- Timur. Yonif 521/DY dikenal dengan kemampuan dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugas- tugas pertahanan, serta komitmen yang kuat dalam melindungi wilayah negara. Sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pertahanan. Sinergi ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk kerjasama, seperti koordinasi operasional dimana pemerintah daerah dan Yonif 521/DY dapat bekerja sama dalam mengkoordinasikan operasi- operasi pertahanan di wilayahnya. Hal ini dapat membantu dalam mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas.

Pengembangan Infrastruktur, Pemerintah daerah dapat membantu Yonif 521/DY dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi pertahanan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Pengembangan Keterampilan dengan cara Yonif 521/DY dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada warga setempat dalam bidang pertahanan, sementara pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan sumber daya. Dan dilakukannya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

koordinasi kebijakan dimana pemerintah daerah dan Yonif 521/DY dapat bekerja sama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Selain itu dalam menjalankan sinergi diperlukan juga kepemimpinan yang dapat mengimplementasikan terhadap kebijakan dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan tersebut karena kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap sinergi antara pemerintah dengan TNI. Kepemimpinan efektif, karena kepemimpinan adalah kunci dalam mencapai sinergi yang kuat antara Pemda dan Yonif 521/DY. Kepemimpinan yang baik dapat memungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik antara kedua pihak. Diharuskan pula adanya penguatan kapasitas Pemimpin sesuai dengan program penguatan kapasitas pemimpin, seperti "Making Indonesia 4.0", yang diselenggarakan oleh Kemenko Maritim, Kemenristek Dikti, Lemhannas RI, dan lembaga United in Diversity (UID), bertujuan untuk mencetak pemimpin yang mampu berkolaborasi dan bersinergi menghadapi revolusi industri 4.0.

Program ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemimpin dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY. Kemudian kepemimpinan strategis yang efektif dapat membantu Yonif 521/DY dan pemerintah daerah bekerja sama dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan yang muncul. Presiden RI menekankan bahwa semua pihak harus bersinergi, terus berkoordinasi, serta bergotong-royong untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY dalam menghadapi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang efektif dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY melalui kolaborasi, kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas pemimpin, kepemimpinan strategis, dan komunikasi yang baik.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

METODE PENELITIAN

Berdasarkan desain kualitatif diharapkan akan didapatkan data dengan pemaknaan-pemaknaan substansial atau mendalam. Untuk itu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan penekanan pada aktivitas observasi dan wawancara secara mendalam atas fenomena yang dihadapi.

Sedangkan alasan lain atas pemilihan desain kualitatif dalam penelitian adalah adanya karakter induktif, dimana obyek kajian menggunakan studi kasus pada daerah dan waktu tertentu. Pemahaman atas penemuan data secara khusus yang terjadi pada daerah dan daerah tertentu, diharapkan dapat diambil pelajaran berupa pemaknaan-pemaknaan yang positif guna dimanfaatkan pada kepentingan yang lebih luas dan umum. Mengingat perolehan data dilakukan dengan menekankan pada wawancara dan observasi pada sumber yang kompeten, maka studi terhadap data sekunder berupa kajian literatur dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat urgen dan relevan untuk dilakukan sebagai pelengkap.

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menemukan objek yang diteliti dengan lebih mendalam dan lengkap. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada proses pelaksanaan penelitian dan analisis data yang lebih detail, serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi, tetapi untuk memahami peristiwa atau fenomena secara lebih holistik dan mendalam.

KERANGKA TEORI

Sesuai dengan pilihan tema yang diajukan, maka kerangka teoritis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep Sinergitas, Perkembangan Wilayah Pertahanan, dan Konsep Perundang-Undangan. Ketiga konsep tersebut diharapkan membentuk keterpaduan sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu analisis guna menerangkan fenomena berdasarkan data yang didapat.

Teori Sinergitas

Diperlukan sinergitas antara pimpinan daerah di wilayah perbatasan guna mewujudkan keamanan wilayah. Sinergitas berasal dari kata sinergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Menurut teori sinergitas (James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986), tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Dalam mewujudkan sinergitas peran TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di daerah dapat dikaitkan pendapat AF Stones James tentang sinergitas. Stones berpendapat bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi tertentu yang bergantung pada elemen kerjasama dan kepercayaan di antara pihak-pihak tersebut

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Teori Kepemimpinan

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.

Menurut Robbin, (2007) Kepemimpinan (*leadership*) sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Sumber pengaruh ini bisa jadi bersifat formal, seperti yang diberikan oleh pemangku jabatan presiden/ketua dalam sebuah organisasi/partai. Karena posisi presiden/ketua memiliki tingkat otoritas yang diakui secara formal, seseorang bisa memperoleh peran pemimpin hanya karena posisinya dalam organisasi/partai tersebut. Namun, tidak semua pemimpin adalah presiden/ketua, demikianpula sebaliknya, tidak semua presiden/ketua adalah pemimpin.

Menurut Henry Mintzberg, (1992) Peran Pemimpin adalah :

- Peran hujung antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
- Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
- Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

PEMBAHASAN

Sinergi Sebagai Bentuk Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan TNI

Sinergitas merupakan konsep yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri, terutama dalam konteks sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY. Sinergi antara Pemerintah Daerah dengan TNI tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan, tetapi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

juga meliputi berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat, seperti pembinaan kesadaran bela negara, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan bencana.

Meningkatkan Perkembangan Wilayah Pertahanan Daerah

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan daerah sangat penting dan strategis. Pemerintah daerah dapat mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan daerah. Meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan daerah berarti melaksanakan penataan ruang yang efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara. Dengan demikian, meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan daerah berarti mengembangkan rencana dan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara, sambil mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan pengembangan wilayah secara holistik.

Bagaimana Sinergi Pemerintah Daerah Dengan Yonif 521/DY Dalam Meningkatkan Perkembangan Wilayah Pertahanan Di Kabupaten Kediri

Berdasarkan teori kepemimpinan menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin daerah dan satuan Yonif 521/DY dapat dilihat sebagai integrasi dari lima komponen utama: perencana, pelaksana, koordinator, pengawas, dan pemimpin.

Dengan demikian, peran pemimpin daerah dan satuan Yonif dapat dilihat sebagai efektif dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri dengan mengintegrasikan peran perencana, pelaksana, koordinator, pengawas, dan pemimpin. Sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Yonif 521/DY dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri merupakan contoh yang baik dalam implementasi sinergitas antara pemerintah dan militer.

Sinergi antara Pemda Kabupaten Kediri dan Yonif 521/DY telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di daerah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tersebut. Dengan kerja sama yang erat, mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi militer, serta memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Hal ini merupakan contoh yang baik dalam implementasi sinergitas antara pemerintah dan militer dalam meningkatkan pertahanan negara.

Pertahanan dan keamanan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah. Di Kabupaten Kediri, sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY telah berperan penting dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan. Berikut adalah penjelasan dan pembahasan menggunakan teori kepemimpinan mengenai sinergi ini. Teori kepemimpinan transformasional, yang dikembangkan oleh James MacGregor Burns, menekankan pentingnya pemimpin yang dapat memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY, pemimpin yang efektif harus dapat membangun kepercayaan dan kerja sama yang kuat antara kedua pihak.

Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats)

Analisis SWOT Sinergi Pemerintah Daerah dengan Yonif 521/DY dalam Meningkatkan Perkembangan Wilayah Pertahanan di Kabupaten Kediri.

Tabel Analisa SWOT Sinergi Pemda dengan Yonif 521/DY

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Strategis Pemda dan Yonif 521/DY • Kesiapan dan Profesionalisme pemimpin daerah dan satuan • Keterlibatan Pemda dan satuan Yonif 521/DY dalam Kegiatan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada Sumber Daya • Keterbatasan Sumber Daya Manusia • Ketergantungan pada Kebijakan Pemerintah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Peluang (<i>Opportunity</i>)	Kendala (<i>Threat</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan Meningkatkan Keamanan Wilayah • Kerja Sama dengan Masyarakat Lokal • Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik Sosial dan Politik • Keterbatasan Sumber Daya • Kebijakan Pemerintah yang Tidak Mendukung

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian sinergitas Pemerintah Daerah (Pemuda) Kediri dengan Yonif 521/DY dalam meningkatkan pembangunan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri, yaitu :

- Bagaimana sinergi sebagai bentuk kerjasama antara Pemda dengan TNI : Sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY bertujuan untuk meningkatkan keseluruhan kinerja dan efektivitas dalam pengembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri. Sinergi dalam konteks kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merujuk pada kerja sama yang efektif dan harmonis antara kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan penanganan berbagai isu. Kerjasama antara Pemda Kediri dengan Yonif 521/DY telah menciptakan suasana nyaman, damai dan aman di Kabupaten Kediri. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti upacara serah terima jabatan Yonif 521/DY dan upacara penyambutan komandonya, kerjasama dalam pembangunan infrastruktur, kolaborasi dalam peningkatan kapasitas manusia yang dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara profesional, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.
- Bagaimana meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan daerah :

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan daerah tentunya diperlukan kerjasama dari semua pihak, Pemda, Masyarakat dan TNI sebagai satuan untuk menjaga keamanan dan pertahanan daerah. Maka dari itu diperlukan beberapa aspek penting berupa penyusunan RTRW , sinkronisasi kebijakan, pengembangan wilayah holistic, dan penggunaan wilayah untuk kegiatan pertahanan. Pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan daerah, diantaranya *pertama* dengan pengelolaan infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas komunikasi.

Hal ini untuk memduahkan operasi militer, serta mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. *Kedua*, penataan wilayah pertahanan darat. Hal ini melibatkan klasifikasi wilayah pertahanan darat berdasarkan potensi ancaman dan kebutuhan keamanan. Pemda harus bekerja sama dengan Kodam dan Dinas PUPR untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah pertahanan dengan rencana tata ruang lainnya. *Ketiga*, adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemda, TNI, dan Polri. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan penataan wilayah pertahanan di integrasikan dengan rencana tata ruang daerah. *Keempat*, Pengelolaan Sumber Daya. *Kelima*, Dilaksanakannya program kerjasama TNI dan Pemda seperti TMMD. *Keenam*, Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan pertahanan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan tentang keamanan dan pertahanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan pertahanan.

- Bagaimana sinergi Pemda dengan Yonif 521/DY dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kab. Kediri :

Sinergi antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY dalam meningkatkan perkembangan wilayah pertahanan di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari beberapa aspek. Pemimpin yang efektif harus dapat membangun kepercayaan dan kerja sama yang kuat antara kedua pihak. Kolaborasi, strategi, kesiapan, dan profesionalisme

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

merupakan faktor-faktor penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, sinergi ini dapat meningkatkan keamanan dan kondusifitas wilayah, serta membangun hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan Yonif 521/DY.

- Kerja Sama dengan Yonif 521/DY : Kerja Sama Pertahanan, Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang kerja sama langsung antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Yonif 521/DY dalam sumber yang tersedia, kerja sama antara pemerintah daerah dan unit militer seperti Yonif 521/DY biasanya dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dan keamanan wilayah. Hal ini dapat melibatkan proyek- proyek pembangunan infrastruktur, pelatihan militer, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartiwiningsih, Lego Karjoko, Soehartono. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Indrawan, R. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irawan Soehartono. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986. Stoner , James A.F dan Charles Wankel. 2013. *Pengantar Manajemen edisi keempat jilid lima dialih bahasakan oleh Siswanto*, Jakarta.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. 2002. Terjemahan oleh Nur Kabibah dkk. Jakarta: KIK Press.
- Joseph A. Maxwell. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London: Sage Publications.
- Maria Farida Indrati. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Rowland Bismark Fernando Pasaribu, *Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, <http://www.scribd.com/doc/102690268/Peran-Negara-Dan-Masyarakat-Dalam-Pembangunan-Demokrasi-Dan-Masyarakat-Madani-Di-Indonesia> (diunduh tanggal 26 September 2014).
- Kalimat populer dari Aristoteles, seorang filisof Yunani kuno, “The whole Greater

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

than the sum of its parts”, <http://www.goodreads.com/quotes/20103-the-whole-greater-than-the-sum-of-its-parts>.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SKM/article/view/420>
https://www.academia.edu/98382591/Sinergitas_Yonif_Mekanis_202_T_J_Polri_Dan_Pemda_Dalam_Penanganan_Potensi_Konflik_Pilkada_Serentak_DI_Kota_Bekasi_Tahun_2018?uc-sb-sw=11094602
<https://www.antarane.ws.com/berita/3025977/bskdn-tegaskan-pentingnya-sinergitas-pemerintah-pusat-dan-daerah>
<https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/784373750/tiga-tahun-memimpin-pelayanan-publik-di-pemkab-kediri-kian-membaik>
UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.